

Dinamika Posisi Identitas Etnis Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial

Oleh : Fitri Eriyanti

ABSTRACT

Basically, each individual wished to have a positive social identity. In the point of view of social identity theory, the wishes to have positive social identity is viewed as an important psychological drive in individual actions at all social interactions. All this time, there are so many policies of Indonesian government that made the position of Indonesian-Chinese identity to be marginalized, both in colonial and independence eras. The dynamics of position of Indonesian-Chinese identity are basically related to the treatment of government. It seemed that the efforts to have positive social identity, the social mobility of the Indonesian-Chinese varied and depended on the perception of each group in connecting with how to improve themselves images. Besides, there is also a tendency that they tried to make social changes through the improvisation of themselves images from their Chinese's identity.

Kata kunci: *Posisi, Identitas Etnis, Identitas Sosial, Interaksi Sosial, Etnis Tionghoa*

I. PENDAHULUAN

Proses pencarian identitas diri di kalangan masyarakat etnis Tionghoa di Indonesia menunjukkan suatu dinamika tersendiri. Kalau dibandingkan dengan keadaan orang-orang Tionghoa di beberapa negara tetangga seperti Philipina ataupun Thailand, dimana orang Tionghoa sudah berakulturasi dan menjadi warga pribumi, maka posisi etnis Tionghoa di Indonesia nampaknya belum menemukan format yang tepat. Di Indonesia kelihatannya masih berlaku

istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan etnis Tionghoa dengan etnis pribumi yang lain. Sementara terhadap etnis pendatang lain seperti Arab, India, istilah non pribumi ini nampaknya tidak berlaku. Walaupun orang Tionghoa sudah beranak cucu di bumi Indonesia selama ratusan tahun, namun sampai saat ini masih saja berkembang anggapan orang Tionghoa sebagai perantau, orang yang menumpang hidup dan cari makan di negeri orang. Orang Tionghoa juga

menyandang label WNI lengkap dengan berbagai atribusi yang cenderung berkonotasi kurang menyenangkan. Sering diibaratkan bahwa orang Tionghoa hanya diterima di beranda depan rumah dan belum diterima di dalam rumah sebagai keluarga sendiri.

Selain itu, selama ini kebijakan para penguasa membuat kedudukan etnis minoritas ini selalu saja tersudut baik itu di era kolonial maupun di era kemerdekaan¹. Di era Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tercatat dua peristiwa yang dirasakan sebagai pukulan yang menyakitkan bagi masyarakat Tionghoa, yaitu peristiwa G30S PKI tahun 1965 dan kerusuhan Mei 1998. Menurut Lan² peristiwa 1965 merupakan trauma paling berat bagi orang Tionghoa di Indonesia. Sementara berdasarkan penelitian yang dilakukan pada era pasca kerusuhan Mei 1998, Bachrun dan Hartanto³ menyimpulkan

telah terjadi krisis identitas di kalangan orang Tionghoa, karena segala upaya yang telah dilakukan agar bisa diterima sepenuhnya sebagai orang Indonesia telah hancur dalam waktu singkat akibat kerusuhan tersebut. Bagi Suryadinata⁴, seorang pakar Tionghoa yang cukup dikenal, masalah identitas merupakan bagian penting dalam pemecahan ‘masalah Tionghoa’ di Indonesia. Uraian berikut akan mengetengahkan dinamika posisi identitas etnis Tionghoa di Indonesia dalam tinjauan teori identitas sosial.

II. WACANA IDENTITAS DALAM TINJAUAN TEORI IDENTITAS SOSIAL

Identitas merupakan hal yang fundamental pada setiap interaksi sosial dan selanjutnya menentukan bentuk interaksi sosialnya. Lan⁵ mengatakan bahwa setiap individu memerlukan identitas untuk memperolehnya sense of belonging dan eksistensi sosial. Menurut Jeffrey Weeks⁶ ada beberapa alasan yang

¹ Susetyo, D.P.B. 2002 *Stereotip Dan Relasi Antar Etnis Cina Dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia

² Lan, T, J. 1998. *Pengalaman Etnik Tionghoa Dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah. Simposium Etnis Tionghoa Sebagai Minoritas di Indonesia. Depok, 26 Oktober 1998.

³ Bachrun, R dan Hartanto, B. 2000. “Krisis Identitas Diri Pada Kelompok Minoritas Tionghoa”. Dalam Wibowo, I (editor). *Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.

⁴ Suryadinata, Leo. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.

⁵ Lan, T, J. 2000. “Susahnya Jadi Orang Tionghoa. Ke-Tionghoa-an Sebagai Konstruksi Sosial”. Dalam Wibowo, I (editor). *Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.

⁶ Weeks, Jeffrey. 1990. “The Value of Difference”. Dalam Jonathan Rutherford (ed). *Identity, Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.

dapat dikemukakan mengapa identitas perlu dan pantas mendapat perhatian besar. Pertama, dalam hidup sehari-hari orang tidak pernah lupa – baik secara langsung maupun tidak langsung – menanyakan “*anda siapa?*” (*who are you?*) kepada seseorang yang baru dikenalnya. Ini merupakan pertanyaan yang paling mendasar dalam setiap interaksi sosial. Dengan pertanyaan demikian ia tidak sekedar ingin tahu tentang nama, alamat dan pekerjaan, tapi bertanya tentang identitas orang itu. Kalau orang yang ditanya itu gagal menjawab pertanyaan itu, berarti ia gagal dalam menampilkan identitasnya, sekaligus gagal menghadirkan diri sebagai subyek. Subyektivitas merupakan landasan pertama dalam setiap interaksi sosial⁷. Kedua, identitas adalah tentang *sense of belonging*, tentang persamaan dengan sejumlah orang dan tentang apa yang membedakan kamu dengan lainnya. Sebagai sesuatu yang paling mendasar, identitas memberi kamu rasa tentang lokasi pribadi, inti yang stabil bagi individualitas kamu.

Dalam bidang sosiologi, konsep identitas mengacu kepada struktur keanggotaan kelompok, seperti peranan sosial, kategori dan ciri yang dapat menunjukkan seorang individu dalam suatu kelompok tertentu. Seseorang yang beridentitas sama mempunyai persamaan kebudayaan,

institusi-institusi dasar seperti agama, bahasa, organisasi sosial dan politik. Diantara mereka tumbuh kesadaran dan perasaan “kekitaan” (*esprit de corps*). Secara umum, konsep identitas mengacu kepada *the self*, yaitu menerangkan *apa* dan *siapa* seseorang itu. Hal ini sebagaimana yang didefinisikan oleh Hogg dan Abrams⁸, dan Jenkins⁹:

Identity is people's concepts of who they are, of what sort of people they are, and how they relate to others" (Hogg and Abrams 1988:2). Identity refers to the ways in which individuals and collectivities are distinguished in their social relations with other individuals and collectivities"

Taylor dan Moghaddam¹⁰ menjelaskan, identitas individu yang tampil dalam setiap interaksi sosial disebut dengan identitas sosial, yaitu bagian dari konsep diri individu yang terbentuk karena kesadaran individu sebagai anggota suatu kelompok sosial, dimana di dalamnya mencakup nilai-nilai dan emosi-emosi penting yang melekat dalam diri individu sebagai anggotanya. Semen-

⁷ *Ibid*, hal: 88.

⁸ Hogg, Michael and Dominic Abrams. 1988. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge.

⁹ Jenkins, Richard. 1996. *Social Identity*. London: Routledge.

¹⁰ Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M. 1994. *Theories of Intergroup Relations*. London:

tara itu Wendt¹¹ menambahkan bahwa identitas sosial adalah skema kognitif yang memungkinkan pelaku untuk menentukan 'siapa sayalkita' dalam suatu situasi dan posisi dalam struktur peran sosial pemahaman dan ekspektasi bersama.

Menurut Hogg dan Abrams¹² di dalam masyarakat sendiri secara hirarkis terstruktur kategori-kategori sosial yang merupakan penggolongan orang menurut negara, ras, klas sosial, pekerjaan, jenis kelamin, etnis, agama dan lain sebagainya. Di dalam masing-masing kategori sosial tersebut melekat suatu kekuatan, status dan martabat yang pada akhirnya memunculkan suatu struktur sosial yang khas dalam masyarakat, yaitu suatu struktur yang menentukan kekuatan dan status hubungan antarindividu dan antar kelompok.

Pada dasarnya setiap individu ingin memiliki identitas sosial yang positif. Hal tersebut menurut Hogg dan Abrams dalam rangka mendapatkan pengakuan (*recognition*) dari pihak lain dan persamaan sosial (*social equality*). Bahkan menurut Laker¹³, dalam keadaan dimana individu ataupun kelompok merasa identitasnya sebagai anggota suatu kelompok kurang berharga maka akan

muncul fenomena *misidentification*, yaitu upaya mengidentifikasikan diri pada identitas atau kelompok lain yang dipandang lebih baik. Fenomena ini misalnya ditemukan pada anak-anak kulit hitam di Amerika yang justru menganggap rendah kelompoknya sendiri dan lebih senang mengidentifikasikan diri pada kelompok kulit putih.

Teori identitas sosial¹⁴ menekankan bahwa perilaku individu mencerminkan unit masyarakat si individu yang lebih besar. Ini berarti bahwa struktur-struktur masyarakat yang 'rumit' seperti kelompok, organisasi, budaya dan, yang paling penting, identifikasi individu dengan unit-unit kolektif ini memandu struktur dan proses internal. Kompetensi budaya berada pada inti teori ini karena keanggotaan kelompok kolektif mempengaruhi dan menentukan pemikiran serta perilaku individu¹⁵.

Teori identitas sosial menyatakan bahwa orang berfikir, merasakan, dan bertindak sebagai anggota kelompok kolektif, institusi,

¹¹Wendt, Alexander. 1994. *Collective Identity Formation and the International State*. American Political Science Review 88:384{96}.

¹²Hogg, Michael and Dominic Abrams. 1988. *Op cit*.

¹³Dalam Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M. 1994. *Op cit*.

¹⁴Tajfel, H., & Turner, J.C. 1986. The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. Austin (Eds.), *The social psychology of intergroup behavior* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.

¹⁵Markus, H. R., Kitayama, S., & Heiman, R. J. 1996. "Culture and "basic" psychological principles". In E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), *Social Psychology: Handbook of Basic Principles* (pp. 857-913). New York: Guilford.

dan budaya. Pendekatan identitas sosial menekankan pemikiran bahwa kognisi sosial individu ditafsirkan secara sosial tergantung pada kerangka acuan kolektif atau kelompok mereka. Sebagai contoh, para imigran yang menganggap diri mereka terstigmatisasi secara negatif dikarenakan warna kulit yang gelap atau aksen bahasa, mungkin enggan untuk berakulturasi karena meyakini bahwa pandangan negatif seperti itu tidak akan hilang meskipun mereka kompeten secara kultural dalam budaya dominan.

Teori identitas sosial mencoba menjelaskan hubungan antar kelompok secara umum dan konflik sosial secara khusus. Teori ini meliputi tiga point utama: 1) Orang termotivasi untuk mempertahankan konsep diri yang positif, 2) Konsep diri tersebut sebagian besar berasal dari identifikasi kelompok, dan 3) Orang membangun identitas sosial yang positif dengan membandingkan *kelompok dalam* dan *kelompok luar* mereka¹⁶. Dengan demikian, teori identitas sosial mengasumsikan bahwa proses-proses perbandingan sosial internal mendorong konflik antar kelompok, meskipun tidak terdapat persaingan atau kompetisi

eksplisit di antara kelompok. Variabel-variabel struktural seperti kekuasaan, hirarki, kelangkaan sumber daya cenderung menyebabkan pandangan yang lebih mendukung *kelompok dalam* dibanding *kelompok luar*.

Dalam pandangan teori identitas sosial, keinginan untuk memiliki identitas sosial yang positif dipandang sebagai motor psikologik penting di balik tindakan-tindakan individu dalam setiap interaksi sosial. Hal tersebut berlangsung melalui proses *social comparison* yang dipandang sebagai cara untuk menentukan posisi dan status identitas sosialnya¹⁷. Proses *social comparison* merupakan serangkaian perbandingan dengan orang atau kelompok lain yang secara subyektif membantu individu membuat penilaian khusus tentang identitas sosialnya dibanding identitas sosial yang lain¹⁸.

Selalu ada upaya-upaya untuk mempertahankan identitas sosial yang positif dan memperbaiki citra jika ternyata identitas sosialnya sedang terpuruk baik dalam skala individual maupun skala kelompok. Dalam konteks makro sosial (kelompok, masyarakat) maka upaya mencapai identitas sosial positif dicapai melalui 1) mobilitas sosial dan 2) perubahan sosial.

¹⁶ Operario, D., & Fiske, S.T. 1999. "Integrating Social Identity and Social Cognition: A framework for Bridging Diverse Perspectives". In D. Abrams & M. A. Hogg (Eds.), *Social identity and social cognition* (pp. 26-54). Cambridge, MA: Blackwell.

¹⁷ Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M. 1994.
Op cit.

¹⁸ Hogg, Michael and Dominic Abrams. 1988.
Op cit.

Mobilitas sosial adalah perpindahan individu dari kelompok yang lebih rendah ke kelompok yang lebih tinggi. Mobilitas sosial hanya mungkin terjadi jika peluang untuk berpindah itu cukup terbuka. Namun demikian jika peluang untuk mobilitas sosial tidak ada, maka kelompok bawah akan berusaha meningkatkan status sosialnya sebagai kelompok. Pilihan pertama adalah dengan menggeser statusnya ke tingkat lebih atas. Kalau kemungkinan menggeser ke posisi lebih atas tidak ada, maka usaha yang dilakukan adalah dengan meningkatkan citra mengenai kelompok agar kesannya tidak terlalu jelek¹⁹..

III. POSISI IDENTITAS ETNIS TIONGHOA DALAM TINJAUAN TEORI IDENTITAS SOSIAL

Dinamika posisi identitas etnis Tionghoa sebenarnya terkait perlakuan yang diterima dari pihak penguasa. Dalam Sarwono²⁰ dan Susetyo²¹ dikemukakan bahwa pada zaman pemerintahan kolonial Belanda, perbedaan status etnis diberlakukan dengan tegas. Orang Eropa diberi status tertinggi dan mempunyai hak dan fasilitas terbaik. Orang Tionghoa yang waktu itu disebut

orang Timur Asing (*vreemde oosterlingen; eastern orientals*) mempunyai status di bawah orang Eropa, dan golongan pribumi (*inlander*) diberi status yang paling rendah (kecuali bangsawan yang diberi status seperti Eropa).

Ini adalah politik yang sengaja dilakukan oleh penjajah Belanda untuk mempertahankan *pemisahan* masyarakat Tionghoa dan penduduk pribumi yang disebut '*Divide and Rule*'. Hal ini disebabkan oleh adanya kekhawatiran jikalau masyarakat Tionghoa bersatu dengan golongan pribumi, akan memiliki kekuatan untuk menentang penjajahan Belanda di Indonesia²². Usaha ini dimaksudkan penjajah Belanda untuk memperburuk pandangan golongan pribumi terhadap keturunan Tionghoa. Salah satu contoh dari usaha tersebut adalah hak istimewa terhadap keturunan Tionghoa seperti pendidikan dan kesempatan kerja yang lebih baik.

Dalam statusnya yang di tengah ini, orang Tionghoa meningkatkan citranya dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu mengadopsi berbagai identitas yang melekat pada orang Eropa ataupun Belanda. Banyak orang Tionghoa yang berpendidikan ala Eropa, cara mereka berpakaian juga ala Eropa, mereka juga mengadopsi agama Protestan dan Katolik seperti orang

¹⁹Hogg, Michael and Dominic Abrams. 1988. *Op cit.*; Sarwono, S.W. 1999. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.

²⁰Sarwono, S.W. 1999. *Op cit.*

²¹Susetyo, D.P.B. 2002, *Op cit.*

²²Suryadinata, Leo. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES, hal: 8.

Eropa disamping keyakinan yang mereka bawa dari tanah leluhurnya, dan lain sebagainya. Amat jarang orang Tionghoa yang mengidentifikasikan diri dengan identitas pribumi, karena status pribumi yang lebih rendah. Interaksi dengan orang pribumi nampaknya lebih untuk kepentingan dagang dan kepentingan lain yang bisa menguntungkan. Dalam hal tertentu orang pribumi malah terangkat derajatnya, misalnya ketika ada perempuan pribumi yang dinikahi orang Tionghoa. Dengan demikian, yang menonjol pada orang Tionghoa di era kolonial Belanda adalah perpaduan antara identitas Tionghoa tradisional dan identitas ala Eropa.

Politik *'Divide and Rule'* terhadap keturunan Tionghoa berlangsung terus sampai masa penjajahan Jepang. Penjajah Jepang dengan sengaja memisahkan dan memaksa orang-orang keturunan Tionghoa untuk belajar di sekolah yang dibuat khusus untuk mereka, dan mereka diharuskan untuk menggunakan bahasa Mandarin dalam proses belajar mengajar²³. Lebih dari itu mereka juga diharapkan untuk berbahasa Mandarin di luar jam sekolah. Beberapa orang keturunan Tionghoa juga diperkerjakan oleh tentara Jepang sebagai seorang mata mata.

Hal ini menyebabkan bertam-bahnya pandangan buruk terhadap keturunan Tionghoa karena mereka dianggap membantu penjajah Jepang, yang tentu saja sangat dibenci karena perlakuan mereka yang sangat kejam terhadap masyarakat pribumi.

Namun demikian situasinya nampak berbeda sama sekali ketika memasuki era kemerdekaan. Persoalan yang mengedepan terutama adalah tentang kepastian status kewarganegaraan. Dikemukakan oleh Greif²⁴ orang Tionghoa pada masa itu terjepit antara berbagai kepentingan baik yang berskala nasional maupun internasional. Pemerintah Indonesia pada waktu itu tidak bisa segera memberikan kepastian. Bahkan undang-undang yang mengatur hal ini ditengarai akan membatasi jumlah orang Tionghoa yang bisa menjadi warganegara Indonesia. Sementara pemerintah RRC pada waktu itu masih memberlakukan kewarganegaraan ganda bagi orang Tionghoa di perantaraan, yaitu disamping menjadi warganegara di negara tempat merantau juga melekat kewarganegaraan Tionghoa. Sebagai reaksi terhadap keadaan tersebut maka sejumlah tokoh Tionghoa mendirikan "Baperki" (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia) yang inti perjuangannya ingin menempatkan etnis Tionghoa sejajar dengan

²³Suryadinata, Leo. 1978. *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*. Heinemann Educational Books. Kuala Lumpur: Malaysia, hal: 147.

²⁴ Greif, Stuart. W. 1991. *WNI - Problematik Orang Indoensia Asal Tionghoa*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: Indonesia.

etnis/suku lain dengan konsep integrasi. Sementara kelompok Tionghoa yang lain menghendaki asimilasi sebagai solusi.

Sejak terjadinya peristiwa pemberontakan PKI 1965, keadaannya berbalik sama sekali. Konsep integrasi secara politis telah dikategorikan sebagai bagian dari ideologi komunis sosialis²⁵. Dengan demikian pilihan satu satunya yang diberi ruang oleh penguasa adalah dengan asimilasi. Kebijakan asimilasi sebenarnya mengarahkan hubungan antar-etnis, di mana hanya satu pihak etnis yang diharapkan melebur ke dalam masyarakat lainnya. Menurut Leo Suryadinata²⁶ (2002:45), asumsi yang mendasari mengapa kebijakan asimilasi diberlakukan adalah karena orang-orang Tionghoa masih dianggap sebagai "masalah". Orang-orang Tionghoa dipandang sebagai "ancaman" karena pada zaman Orde Lama, orang Tionghoa memiliki kecenderungan loyalitas ke RRC. Ketika mereka diberi ruang untuk berpolitik, mereka ternyata membelokkan loyalitas mereka kepada RRC dan gerakan komunis.

Selain itu, karena dipandang kurang patriotis/nasionalis, eksklusif, dan mendominasi ekonomi nasional, maka orang Tionghoa semakin sulit diterima di Indonesia. Mereka akan lebih mudah diterima apabila mau berbaur hingga mencapai hal-hal yang

sebenarnya merupakan wilayah kehidupan privat mereka, antara lain memeluk agama Islam dan melakukan kawin campur dengan pribumi, di samping itu mau menunjukkan partisipasi politik (yang di masa Orde Baru lebih diartikan loyalitas orang Tionghoa kepada rezim kekuasaan).

Namun, dalam pelaksanaan kebijakan asimilasi ini lebih diwarnai pendekatan keamanan. Banyak studi Tionghoa Indonesia yang dilakukan untuk mencari penyelesaian masalah Tionghoa dengan menekankan pencegahan ketidakstabilan politik. Langkah-langkah yang diambil adalah diberlakukannya kebijakan yang diskriminatif di bidang politik dan budaya agar menyeimbangi kekuatan ekonomi Tionghoa yang memang diberi kelonggaran demi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sebenarnya di sinilah akar permasalahannya mengapa posisi identitas etnis Tionghoa menjadi sedemikian rumit. Pemerintah Orde Baru waktu itu meragukan nasionalisme keturunan Tionghoa. Meski umumnya sudah turun-temurun tinggal di bumi Nusantara, mereka dicurigai, secara politis masih berorientasi ke Republik Rakyat Cina (RRC). RRC, khususnya Partai Komunis Cina (PKC), dituding telah ikut membesarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan punya andil dalam gerakan pemberontakan G-30-S/PKI pada tahun 1965. Itu pula yang menjadi salah satu alasan

²⁵ Lan, T, J. 1998. *Op cit*.

²⁶ Suryadinata, Leo. 2002. *Op cit*, hal: 45.

pemerintah memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC pada tahun 1967.

Dengan diberlakukannya Instruksi Presiden (Inpres) No. 14 Tahun 1967 oleh pemerintah Orde Baru membuat warga masyarakat keturunan Tionghoa tak lagi bisa merayakan ritual-ritual Konghucu, kepercayaan asli mereka. Termasuk merayakan Imlek dengan menggelar pertunjukan barongsai dan mengarak patung dewa-dewa alias *toapekong* di tempat-tempat umum. Koran-koran beraksara Cina juga diberangus. Sekolah-sekolah Tionghoa yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Cina pun ditutup. Sejak itu kaum keturunan Tionghoa terpaksa bergerilya dalam berkebudayaan. Ritual-ritual dan perayaan-perayaan yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, dan tradisi asli Cina dilakukan secara tertutup. Ritual Imlek hanya dilakukan komunitas Tionghoa dalam lingkungan kelenteng.

Sikap diskriminatif yang mereka terima baik secara politik maupun sosial akibat "sinophobia", membuat sebagian warga keturunan Tionghoa sampai merasa perlu menyamarkan identitas etnik dan kebudayaan mereka hanya agar bisa tetap *survive* di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Antara lain dengan mengganti nama Tionghoa mereka dengan nama yang lebih *Indonesiawi*. Untuk tujuan sama, sebagian secara resmi juga meninggalkan ajaran Konghucu warisan

orangtua dan memeluk salah satu agama yang diakui pemerintah.

Pasca peristiwa 1965 status etnis Tionghoa sedang dalam kondisi terendah. Mereka dipojokkan oleh penguasa maupun masyarakat bukan Tionghoa. Pada saat itu berbagai kekerasan massa anti Tionghoa mulai marak. Mengacu pada teori identitas sosial, maka ketika suatu kelompok citranya sedang terpuruk selalu ada upaya untuk bereaksi terhadap keadaan ini dalam rangka meraih kembali citra atau identitas sosial yang positif. Adapun modus yang biasa terjadi adalah dengan mobilitas sosial dan perubahan sosial.

Bentuk-bentuk mobilitas sosial yang dilakukan nampaknya cukup bervariasi tergantung dari persepsi masing-masing kelompok tentang bagaimana harus memperbaiki citra. Salah satu reaksi yang muncul adalah dengan eksodus ke luar negeri seperti ke Belanda, kembali ke RRC dan sebagainya. Sementara kelompok asimilasi nampaknya mendapat angin, salah satu tokohnya, Junus Jahja, mendorong orang Tionghoa untuk memeluk agama Islam sebagai kunci pembauran total. Dalam penelitian yang dilakukannya terhadap subyek mahasiswa dan siswa SMU etnis Tionghoa di Semarang, Susetyo (2002) menemukan bahwa ada kecenderungan subyek untuk mengadopsi sifat-sifat positif dari etnis Jawa sebagai identitas sosialnya. Hal ini nampak menjadi salah satu solusi

dalam pencarian identitas ini. Pada akhirnya kita akan menemukan identitas Tionghoa yang Jawa, Tionghoa yang Batak, Tionghoa yang Padang, Tionghoa yang Sunda dan sebagainya. Namun demikian ketika mereka tidak dapat menemukan hal-hal yang mendukung perbaikan citra dirinya sebagaimana hal di atas, banyak juga yang akhirnya pindah keluar negeri menjadi kelompok yang beridentitas kosmopolitan, internasional, lintas etnis maupun lintas negara. Dinamika tersebut nampaknya dapat tergambarkan dari penelitian dari Lan²⁷ tentang orientasi identifikasi diri ataupun dari Tan²⁸ tentang aspirasi politik di atas.

Selain melalui mobilitas sosial, nampaknya juga ada kecenderungan melakukan perubahan sosial, yaitu dengan memperbaiki citra dari ke-Tionghoa-an. Salah satunya adalah dengan menggeser orientasi ke-Tionghoa-an dari yang berorientasi tradisional menjadi ke-Tionghoa-an yang berorientasi nasional. Barangkali kecenderungan ini lebih banyak berkembang di kalangan generasi yang lebih muda, dimana mereka sudah tidak begitu menguasai lagi adat istiadat Tionghoa tradisional, tidak bisa berbicara dalam bahasa mandarin, memiliki pendidik-

an yang modern. Dengan demikian ke-Tionghoa-an sekarang tampil dalam kemasan dan citra baru yang lebih bisa diterima dan tidak lagi berasosiasi dengan masa lalu yang traumatis.

Pencarian posisi identitas etnik Tionghoa menemukan titik terang setelah keluarnya Keppres No. 6 Tahun 2000 yang diumumkan pada 18 Januari 2000 oleh Presiden Abdurrahman Wahid, yang sekaligus mencabut Inpres No.14 Tahun 1967²⁹. Artinya, warga keturunan Tionghoa tak lagi memerlukan izin khusus untuk mengekspresikan secara publik berbagai aspek dari identitas etnis, kepercayaan, kebudayaan, dan tradisi asli mereka.

Sejak saat itu pulalah, sesuatu yang berbau Tionghoa mulai mendapatkan tempat di Indonesia. Di mana-mana ucapan selamat tahun baru bagi kelompok etnis Tionghoa dikumandangkan. Hotel, restoran, dan pertokoan ramai dengan tawaran untuk merayakan tahun Naga Emas. Tak ketinggalan, biro perjalanan menawarkan tour ke Singapura, Hongkong, bahkan Australia dalam rangka merayakan tahun baru Tionghoa.

Sementara itu, di bidang kesenian, yang sedang naik daun adalah *barongsai* dan *liong*. Setiap ada acara, baik itu diselenggarakan komunitas Tionghoa atau bahkan orang Indonesia sendiri, tidak jarang

²⁷ Lan, T, J. 1998. *Op cit*.

²⁸ Tan, M.G. 1999 *Aspirasi Politik Etnik Tionghoa*. Dalam Majalah Tempo. Edisi 14-22 Februari 1999.

²⁹ Burchell, Rebecca. 2004. *Community Perceptions about Keppres 6/2000: Case Study Yogyakarta*. Unpublished.

jenis kesenian tersebut ditampilkan. Atraksi barongsai yang sudah ratusan tahun dikenal di Indonesia tetapi dilarang selama 32 tahun saat pemerintahan Orde Baru, menemukan panggungnya kembali.

IV. KESIMPULAN

Dari paparan di atas dapat disimpulkan, bahwa dinamika identitas etnik Tionghoa di Indonesia sangat terkait dengan nuansa kebijakan politik penguasa, dimana mereka memiliki kepentingan tertentu untuk menempatkan etnis Tionghoa sesuai dengan kemauan politiknya. Posisi minoritas yang cenderung

rentan, selalu memojokkan etnis Tionghoa dari waktu ke waktu.

Misidentitas etnis Tionghoa terutama memuncak pasca pemberontakan G30S PKI yang menempatkan status etnis Tionghoa dalam tataran terburuk. Dalam upaya menemukan kembali citra identitas sosial yang positif, etnis Tionghoa menggunakan modus yang variatif baik dalam bentuk mobilitas sosial maupun dengan perubahan sosial. Namun sejak keluarnya Keppres No. 6 Tahun 2000, etnik Tionghoa dapat mengukuhkan kembali identitas etnis, kepercayaan, kebudayaan, dan tradisi asli mereka.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Bachrun, R dan Hartanto, B. 2000. "Krisis Identitas Diri Pada Kelompok Minoritas Tionghoa". Dalam Wibowo, I (editor). *Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.
- Burchell, Rebecca. 2004. *Community Perceptions about Keppres 6/2000: Case Study Yogyakarta*". Unpublished.
- Greif, Stuart. W. 1991. *WNI - Problematik Orang Indoensia Asal Tionghoa*. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta: Indonesia.
- Hogg, Michael and Dominic Abrams. 1988. *Social Identifications: A Social Psychology of Intergroup Relations and Group Processes*. London: Routledge.
- Jenkins, Richard. 1996. *Social Identity*. London: Routledge.
- Lan, T, J. 1998. *Pengalaman Etnik Tionghoa Dalam Pembentukan Identitas (Nasional) Indonesia*. Makalah. Simposium Etnis Tionghoa Sebagai Minoritas di Indonesia. Depok, 26 Oktober 1998.
- _____. 2000. "Susahnya Jadi Orang Tionghoa. Ke-Tionghoa-an Sebagai Konstruksi Sosial". Dalam Wibowo, I (editor). *Harga Yang Harus Dibayar. Sketsa Pergulatan Etnis Tionghoa di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Pusat Studi Tionghoa.

- Markus, H. R., Kitayama, S., & Heiman, R. J. 1996. "Culture and "basic" psychological principles". In E. T. Higgins & A. W. Kruglanski (Eds.), *Social Psychology: Handbook of Basic Principles* (pp. 857-913). New York: Guilford.
- Operario, D., & Fiske, S.T. 1999. "Integrating Social Identity and Social Cognition: A framework for Bridging Diverse Perspectives". In D. Abrams & M. A. Hogg (Eds.), *Social identity and social cognition* (pp. 26-54). Cambridge, MA: Blackwell.
- Sarwono, S.W. 1999. *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Suryadinata, Leo. 1978. *Pribumi Indonesians, The Chinese Minority and China*. Heinemann Educational Books. Kuala Lumpur: Malaysia.
- _____. 1999. *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- _____. 2002. *Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia*. Jakarta: LP3ES
- Susetyo, D.P.B. 2002 *Stereotip Dan Relasi Antar Etnis Cina Dan Etnis Jawa Pada Mahasiswa Di Semarang*. Tesis. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Tajfel, H., & Turner, J.C. 1986. The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. Austin (Eds.), *The social psychology of intergroup behavior* (pp. 7-24). Chicago: Nelson-Hall.
- Tan, M.G. 1999 *Aspirasi Politik Etnik Tionghoa*. Dalam Majalah Tempo. Edisi 14-22 Februari 1999.
- Taylor, D.M. & Moghaddam, F.M. 1994. *Theories of Intergroup Relations*. London: Praeger.
- Weeks, Jeffrey. 1990. "The Value of Difference". Dalam Jonathan Rutherford (ed). *Identity, Community, Culture, Difference*. London: Lawrence & Wishart.
- Wendt, Alexander. 1994. *Collective Identity Formation and the International State*. American Political Science Review 88:384{96).